

ISSN : 1978-0362

**JURNAL**  
**SOSIOLOGI REFLEKTIF**



Laboratorium Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**JURNAL**  
**SOSIOLOGI REFLEKTIF**  
**Laboratorium Sosiologi**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora**  
**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
**Volume 12, Nomor 2, April 2018**

---

## **PENGELOLA JURNAL**

**Ketua Penyunting/Editor-in-Chief:**

Achmad Zainal Arifin (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

**Sekretaris Penyunting/Managing Editor:**

Muryanti (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

**Penyunting Pelaksana/Editors:**

Achmad Norma Permata (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Firdaus Wajdi (Universitas Negeri Jakarta)

Napsiah (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Yayan Suryana (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Astri Hanjarwati (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Sulistyaningsih (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Rilus A. Kinseng (FEMA Institut Pertanian Bogor)

**Sekretariat/Secretary:**

Novia Tensiani (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Mitra Bestari/Editorial Board:

Alix Philippon (Sciences Po Aix France)

M. Nur Ichwan (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Zuly Qadir (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Syarifudin Jurdi (UIN Alauddin Makassar)

Gregory Vanderbilt (Eastern Mennonite University United States)

**Diterbitkan oleh:**

Laboratorium Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Alamat Redaksi:**

Laboratorium Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Marsda Adisucipto No.1, Yogyakarta

Telp (0274) 51957: Fax. (0274) 519571

**Email:**

sosiologirefleksif@uin-suka.ac.id dan

sosiologirefleksif@gmail.com

Jurnal Sosiologi Reflektif (JSR) adalah jurnal ilmiah berkala yang memfokuskan diri pada hasil penelitian terkait isu-isu sosial-keagamaan di masyarakat Muslim, khususnya yang berkenaan dengan upaya penguatan civil society dari berbagai aspeknya. Selain itu, JSR juga menerima artikel yang bersumber pada telaah pustaka terkait dengan upaya pengembangan teori-teori sosiologi yang terinspirasi dengan studi keislaman, seperti: pengembangan wacana tentang Ilmu Sosial Profetik, Islam Transformatif, atau pendekatan-pendekatan lainnya.

JSR focuses on disseminating researches on social and religious issues within Muslim community, especially related to issue of strengthening civil society in its various aspects. Besides, JSR also receive an article based on a library research, which aims to develop integrated sociological theories with Islamic studies, such as a discourse on Prophetic Social Science, Transformative Islam, and other perspectives.

# JURNAL SOSIOLOGI REFLEKTIF

---

## DAFTAR ISI

<b>THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON INDONESIAN MUSLIM WOMEN'S CONSUMPTION OF ISLAMIC FASHION</b> <i>Durrotul Mas'udah</i> .....	179
<b>AKTIVISME, FILANTROPI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI YOGYAKARTA : Studi terhadap Dinamika Aktivisme Yayasan Sahabat Ibu dalam Pemberdayaan Perempuan di Yogyakarta</b> <i>Ahmad Arif Widiyanto</i> .....	193
<b>RADIKALISASI GERAKAN JAMAAH ANSHARUT TAUHID DAN PENGARUH ISIS DI INDONESIA</b> <i>Asman Abdullah</i> .....	213
<b>EKSISTENSI PUBLIC SPHERE DALAM MEDIA MAINSTREAM: Studi pada Rubrik <i>Citizen Journalism</i> Tribun Yogyakarta</b> <i>Yanti Dwi Astuti</i> .....	233
<b>KONFLIK SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PESISIR DI DESA SUNGSANG KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN SUMATERA SELATAN</b> <i>Yunindyawati<sup>1</sup>, Evalidya<sup>1</sup>, Yusnaini<sup>1</sup>, Rohim Pahrozi<sup>2</sup></i> .....	251
<b>PERAN AKTOR DALAM SOSIOLOGI PEMBANGUNAN: Analisis Pergub D.I. Yogyakarta No. 16 Tahun 2017 tentang Jaringan Trayek Perkotaan Trans Jogja</b> <i>Mohammad Wildan Azmi</i> .....	267

<b>STRATEGI BERJARINGAN RADIO KOMUNITAS ISLAM MADU FM TULUNGAGUNG</b>	
<i>Redi Panuju</i> .....	289
<b>MASYARAKAT BADUY DALAM PERGULATAN TIGA JARINGAN MAKNA</b>	
<i>Efa Ida Amaliyah</i> .....	313
<b>TRANSFORMASI KESETARAAN BURUH: Studi Kritis Teori Keadilan John Rawls</b>	
<i>Mohammad Takdir</i> .....	327
<b>MENETAS JALAN BARU PENGEMBANGAN MASYARAKAT: Sebuah Jawaban di Era Milenium</b>	
<i>Suraji, Muhammad Ali Embi</i> .....	353
<b>PEMBANGUNAN SEBAGAI KEBEBASAN DAN PENCAPAIAN PERUBAHAN SOSIAL</b>	
<i>Amril Maryolo Ar</i> .....	367
<b>PERGESERAN NORMA SOSIAL PADA REMAJA DI KOTA TANJUNGPINANG</b>	
<i>Endri Bagus Prastiyo</i> .....	381
<b>PARTISIPASI KOMUNITAS MUSLIM DESA DALAM USAHA PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI INDONESIA</b>	
<i>Heru Dian</i> .....	395
<b>LITERATUR KEISLAMAN GENERASI MILENIAL</b>	
<i>Syafuddin Sholeh TS</i> .....	413

## PENGANTAR REDAKSI

Assalamualaikum wr. wb.

Jurnal Sosiologi Reflektif Volume 12 Nomor 2, April 2018 ini mengkaji permasalahan sosial yang kompleks dalam perspektif sosiologis. Kajian yang diketengahkan mencakup persoalan konflik nelayan, eksistensi ruang publik dalam media massa, kajian perempuan dan problem masyarakat sehari-hari, termasuk nelayan, organisasi sosial dan keagamaan.

Durrotul menulis tentang *The Impact Of Social Media On Indonesian Muslim Women's Consumption Of Islamic Fashion*. Tulisan ini memaparkan analisis tentang media sosial sebagai sebuah alat konsumsi baru dan pengaruhnya terhadap pola konsumsi fashion Islami oleh wanita Muslim di Indonesia. Hasil analisis menyimpulkan bahwa media sosial, yang dapat dilihat sebagai sebuah alat konsumsi baru, mempengaruhi pola konsumsi fashion Islami oleh wanita Muslim di Indonesia dalam dua cara yang saling berhubungan: (1). media sosial menjadi sebuah ruang konstruksi berbagai macam standar yang dianggap ideal tentang penampilan wanita Muslim yang fashionable dan (2). media sosial mempengaruhi cara-cara wanita Muslim di Indonesia dalam mengkonstruksi dan mempresentasikan identitasnya sebagai wanita Muslim yang fashionable. Kedua hal ini membentuk pola konsumsi mereka terhadap fashion Islami.

Ahmad Arif Widiyanto menulis tentang *Aktivisme, Filantropi Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan Di Yogyakarta : Studi terhadap Dinamika Aktivisme Yayasan Sahabat Ibu dalam Pemberdayaan Perempuan di Yogyakarta*. Penulis menjelaskan artikel ini membahas dinamika aktivisme perempuan Yayasan Sahabat Ibu (YSI) dalam melakukan pemberdayaan perempuan di Yogyakarta. Awalnya YSI terbentuk dari perempuan-perempuan aktivis yang tergerak untuk melakukan *recovery* terhadap anak-anak dan perempuan pasca gempa bumi di Yogyakarta melalui kegiatan filantropis dan motivasi. Aktivisme mereka berlanjut seiring beruntunnya bencana alam di Yogyakarta dari tahun 2006-2012. Para aktivis tersebut kemudian mendeklarasikan diri sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Dalam tulisan ini, Dinamika YSI dibahas dalam tiga poin; *pertama*, potret aktivisme perempuan dan filantropi di Indonesia. *Kedua*, dinamika aktivisme YSI dari karitatif menuju pemberdayaan produktif. *Ketiga*, Upaya YSI untuk melepaskan diri dari ketergantungan bantuan filantropi atau *fundraising* dari lembaga donor melalui pengembangan ekonomi produktif dan pembentukan koperasi simpan pinjam.

Asman Abdullah menulis tentang Radikalisasi Gerakan Jamaah Ansharut Tauhid dan Pengaruh Isis di Indonesia. Penelitian ini merupakan studi kasus yang menyorot gerakan Jamaah Anshorut Tauhid. Gerakan JAT merupakan gerakan jihad dengan tujuan memperjuangkan Syariat Islam di Indonesia. Dua hal yang patut disorot dari gerakan JAT *pertama*, keterlibatan JAT dalam pelatihan militer Aceh tahun 2010. Pelatihan militer ini melibatkan lintas *tanzhim* jihad di Indonesia. Alumni dari pelatihan ini kelak membentuk jaringan radikal baru yang berafiliasi dengan ISIS. *Kedua*, pengaruh ISIS di Indonesia melahirkan perpecahan bagi JAT. Bagi jihadi JAT yang mendukung ISIS tetap bertahan dibawah pimpinan Abu Bakar Ba'asyir dan Aman Abdurrahman sedangkan yang menolak bergabung dengan ISIS harus keluar dari *tanzhim*. *Ketiga*, mereka yang keluar dari JAT membentuk jamaah baru dengan nama Jamaah Anshorut Syariah (JAS) dibawah pimpinan Muhammad Achwan.

Yanti Dwi Astuti menulis tentang Eksistensi *Public Sphere* dalam Media Mainstream: Studi pada Rubrik Citizen Journalism Tribun Yogyakarta. Fenomena *Citizen Journalism* menjadi trend dalam dunia jurnalisme dan menjadi ruang publik baru bagi masyarakat. Salah satu media mainstream yaitu koran Tribun Jogja mengadopsi tren tersebut ke dalam rubriknya yang dinamakan rubrik Citizen journalism. Namun dalam prakteknya, terdapat banyak sekali kecenderungan pemberitaan yang tidak sesuai dengan makna hakiki dari *citizen journalism* dan ruang publik itu sendiri. Dimana cenderung sangat datar dan deskriptif tidak menyentuh pada esensi dari makna ruang publik yaitu pada proses diskusi yang megedepankan debat rasional dan kritis serta masih diberlakukannya proses penyeleksian dan editing oleh redaktornya. Hal ini sangat kontras dengan semangat hadirnya *citizen journalism* yang bersifat bebas dari intervensi siapapun, menyuarakan pendapat secara leluasa, interaktifitas, tidak terbatas oleh halaman (*unlimited space*), tidak ada persaingan antar penulis, dan tidak adanya penyeleksian ketat terhadap konten beritanya.

Yunindyawati, Evalidya, Yusnaini dan Rohim Pahrozi menulis tentang Konflik Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Desa Sungsang

Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Dalam masyarakat pesisir, konflik adalah salah satu gejala sosial yang sering kita jumpai di sekitaran daerah mayoritas nelayan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik sosial yang terjadi antara lain konflik karena penggunaan alat tangkap yang merugikan, tumpang tindih lokasi penangkapan, pengrusakan alat tangkap dan kenakalan remaja. Penyelesaian konflik melibatkan berbagai pihak. Jika secara musyawarah mufakat tidak bisa menyelesaikan masalah, maka akan dilanjutkan dengan mediasi oleh pihak pemerintah desa. Langkah selanjutnya yang ditempuh jika mediasi tidak berhasil maka berlanjut ke pihak berwenang seperti dinas terkait dan bahkan kepolisian.

Wildan Azmi menulis tentang Peran Aktor dalam Sosiologi Pembangunan: Analisis Pergub D.I. Yogyakarta No. 16 Tahun 2017 tentang Jaringan Trayek Perkotaan Trans Jogja. Artikel ini menjelaskan peran aktor kebijakan dalam sosiologi pembangunan sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial. PERGUB D.I. Yogyakarta No. 16 Tahun 2017 tentang Jaringan Trayek Perkotaan Trans Jogja adalah upaya pemerintah sebagai aktor dalam meningkatkan pelayanan publik melalui sektor transportasi publik (Bus Trans Jogja). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan bukan sekedar dari sektor ekonomi dan politik saja, melainkan sektor sosial juga memiliki peran penting dalam pembangunan mewujudkan kesejahteraan sosial. Dengan demikian aktor kebijakan dalam sosiologi pembangunan dari sektor transportasi publik (Bus Trans Jogja) memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Redi Panuju menulis tentang Strategi Berjaringan Radio Komunitas Islam Madu Fm Tulungagung. Fenomena radio komunitas Madu FM sangat menarik untuk diteliti karena merupakan stasiun radio komunitas yang berhasil tumbuh di tengah penyiaran kontestasi. Radio komunitas mendapat pembatasan pembatasan (pembatasan) negara melalui Undang-Undang Penyiaran (UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran). Selain itu, radio komunitas masih harus bersaing dengan radio swasta dan televisi swasta. Madu FM mampu beradaptasi dengan keadaan tanpa melanggar peraturan. Hasilnya adalah strategi penyiaran radio komunitas berhasil berinovasi inovasi sehingga menjadi ada. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode observasi dan wawancara mendalam. Penelitian dilakukan selama periode dari bulan Maret sampai Agustus 2016.

Efa Ida Amaliyah menulis tentang Masyarakat Baduy dalam

Pergulatan Tiga Jaringan Makna. Tujuan tulisan ini mengeksplorasi tentang tiga jaringan makna yang menjadi teori Bernard Adeney-Risakotta, yaitu agama, modernitas, dan budaya nenek moyang pada masyarakat Baduy yang mempunyai pola sedikit berbeda. karena ada dua Baduy, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Baduy Luar sudah terpengaruh pada modernitas, yaitu teknologi (televise dan transportasi), institusi dan gagasan (ide). Tidak ada konfrontasi dari luar Baduy, karena mengedepankan kebersamaan dan saling menghormati. Baduy Luar masih memegang teguh budaya nenek moyang dengan patuh pada puun sebagai kepala suku. Mereka tetap memakai identitas sebagai masyarakat Baduy, yaitu pakaian yang merupakan ciri khas Baduy. Baduy Dalam dalam menerima tiga jaringan di atas. Baduy Dalam merupakan masyarakat yang menonjolkan budaya nenek moyang.

Mohammad Takdir menulis tentang Transformasi Kesetaraan Buruh: Studi Kritis Teori Keadilan John Rawls. Artikel ini bertujuan untuk mengubah paradigma tentang buruh yang selalu dipandang sebagai sekelompok masyarakat yang terbelakang dan tertindas. Dalam memandang relasi buruh dan majikan, sebagian orang seringkali menggunakan paradigma perbudakan daripada paradigma kemanusiaan (*humanitarian paradigm*). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam sebuah struktur sosial masyarakat lebih diakibatkan oleh hilangnya rasa empati yang mendalam terkait dengan argumen kesetaraan (*equality*) sebagai kata kunci dalam konsepsi keadilan. Rawls menawarkan konsep tentang *justice as fairness* yang harus menjadi pijakan utama dalam memperjuangkan kesetaraan buruh dalam berbagai aspek, terutama menyangkut pemenuhan hak, kewajiban dan kesejahteraan hidup.

Suraji, Muhammad Ali Embi menulis tentang Menetas Jalan Baru Pengembangan Masyarakat: Sebuah Jawaban di Era Mellineum. Pengembangan masyarakat proses bergerak ke arah suatu tahap atau kondisi di mana masyarakat menjadi semakin kompeten terhadap permasalahan dan kondisi komunitas maupun lingkungannya. Kompetensi masyarakat yang semakin meningkat ini diharapkan dapat menimbulkan aktivitas pembangunan atas prakarsa masyarakat (komunitas) sendiri. Pengembangan masyarakat juga sebagai gerakan, yang berusaha melakukan reformasi terhadap kondisi yang dianggap kurang menguntungkan. Dalam konteks saat ini tentu pengembangan masyarakat (community development) didasarkan pada nilai-nilai agama, budaya dan kearifan masyarakat lokal menuju kemajuan dan



kesempurnaan dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul di era globalisasi. Kajian yang relevan dalam community development adalah kajian pengembangan masyarakat yang sejalan dengan peran lembaga Perguruan Tinggi yaitu memfungsikan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Amril Maryolo menulis tentang Pembangunan Sebagai Kebebasan dan Pencapaian Perubahan Sosial. Kajian sosial memiliki macam variasi karena masyarakat bukanlah objek yang tunggal. Perubahan sosial merupakan fenomena konstruksi masyarakat yang memiliki ragam yang bervariasi. Pembangunan merupakan suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, sosial, dan sebagainya. Dengan pemahaman seperti itu “pembangunan” disejajarkan dengan kata “perubahan sosial”. Bersamaan dengan teori pembangunan terdapat teori-teori perubahan sosial lainnya seperti sosialisme, dependensia, ataupun teori lain.

Endri Bagus Prastiyo menulis tentang Pergeseran Norma Sosial Pada Remaja di Kota Tanjungpinang. Kota Tanjungpinang merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Kepulauan Riau yang saat ini sedang berkembang, namun memiliki berbagai masalah terkait dengan pergeseran nilai yang terjadi pada generasi mudanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran norma sosial dikalangan remaja Kota Tanjungpinang dimana mereka telah banyak melakukan pelanggaran norma sosial yang ada di masyarakat, mulai dari adanya remaja yang mengkosumsi minuman berakohol, menggunakan narkoba, bahkan melakukan seks bebas. Perilaku ini terjadi karna ada faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran norma itu terjadi, yaitu faktor secara internal dan eksternal, internal berasal dari dalam diri remaja itu sendiri, sementara eksternal merupakan faktor yang didapat dari luar diri remaja.

Heru Dian menulis tentang Partisipasi Komunitas Muslim Desa dalam Usaha Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Indonesia. Terbentuknya BUMDes sebagaimana tertuang dalam UU No.6/2014 belum sepenuhnya mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan, karena hanya sekitar 9,09% desa yang dinilai mampu merealisasikan program BUMDes, bahkan dari jumlah prosentase tersebut hanya terdapat sekitar 21,68% BUMDes yang dinilai menguntungkan. Banyak faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan pembangunan program BUMDes. Satu faktor paling penting adalah kurangnya pengembangan modal sosial di pedesaan.

Demikian kajian Jurnal Sosiologi Reflektif Edisi 12 Nomor 2. Semoga artikel yang penulis sajikan memberikan pengetahuan baru dan bermanfaat bagi pembaca yang budiman.

*Wallahu a'lam bi showab*

*Wassalamualaikum wr.wb*

**JURNAL  
SOSIOLOGI REFLEKTIF**





# STRATEGI BERJARINGAN RADIO KOMUNITAS ISLAM MADU FM TULUNGAGUNG

**Redi Panuju**

Universitas dr Soetomo

Alamar Email : redi.panju@unitomo.ac.id

## **Abstract**

*The purpose of this study is to determine the strategy of community radio broadcasting in particular contestation Madu FM community radio in Tulungagung in East Java Indonesia. Madu FM community radio phenomenon is interesting to study because it is a community radio station that managed to grow in the midst contestation broadcasting. Community radio gets limitation restriction (restriction) of the state through the Broadcasting Act (Act No. 32 of 2002 on Broadcasting). Besides, the community radio still has to compete with the private radio and private television. Madu FM is able to adapt to circumstances without violating the rules. The result is a strategy of community radio broadcasting successfully innovate innovation so that it becomes exist. This research approach is qualitative approach with the method of observation and in-depth interviews. The study was conducted during the period from March to August, 2016.*

**Keywords:** Community Radio, contestation, strategies, adaptation and rational choice.

## **Intisari**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi penyiaran radio komunitas khususnya dalam kontes radio komunitas Madu FM di Tulungagung di Jawa Timur Indonesia. Fenomena radio komunitas Madu FM sangat menarik untuk diteliti karena merupakan stasiun radio komunitas yang berhasil tumbuh di tengah penyiaran kontestasi. Radio komunitas mendapat pembatasan pembatasan (pembatasan) negara melalui Undang-Undang Penyiaran (UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran). Selain itu, radio komunitas masih harus bersaing dengan radio swasta dan

televisi swasta. Madu FM mampu beradaptasi dengan keadaan tanpa melanggar peraturan. Hasilnya adalah strategi penyiaran radio komunitas berhasil berinovasi inovasi sehingga menjadi ada. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode observasi dan wawancara mendalam. Penelitian dilakukan selama periode dari bulan Maret sampai Agustus 2016.

**Kata Kunci:** Radio Komunitas, kontestasi, strategi, adaptasi dan pilihan rasional.

## Pendahuluan

Undang Undang No.32 tahun 2002 tentang penyiaran telah diberlakukan di Indonesia. Keberadaannya membuat banyak kalangan merasa pesimis terhadap masa depan radio komunitas. Radio komunitas diperkirakan akan mati karena dua sebab. *Pertama*, kebedaannya dalam sistem perundang-undangan yang cenderung dibatasi ruang geraknya. *Kedua*, radio komunitas harus bersaing dengan radio swasta yang memiliki modal (kapital) jauh lebih kuat. Namun, kenyataannya radio komunitas justru berkembang sangat pesat.

Keterbatasan-keterbatasan (restriksi) yang diberikan negara kepada radio komunitas tidak menyebabkan masyarakat putus asa mendirikan radio komunitas. Data yang ada di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur menunjukkan di 38 kabupaten serta kota berdiri lembaga radio komunitas. Bahkan, acapkali dalam satu wilayah kecamatan bisa muncul tiga sampai empat radio komunitas. Padahal frekwensi yang diberikan oleh negara maksimal 2 kanal (107.7 M.Hertz dan 107.9 M.Hertz), sehingga pemerintah (Kementerian Komunikasi dan Informatika) memberlakukan sistem seleksi dalam memberikan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP).

Dalam UU 32/2002 tentang Penyiaran, yang dimaksud dengan Lembaga Penyiaran Komunitas (didalamnya radio komunitas) adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauannya terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitas (pasal 21 ayat 1). Diselenggarakan tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata. Radio bertujuan untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi

budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa (pasal 21 ayat 2).

Lembaga penyiaran komunitas merupakan komunitas non-partisan yang keberadaannya: (a) tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional; (b) tidak terkait dengan organisasi terlarang; dan (c) tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu (pasal 21 ayat 3). Lembaga penyiaran komunitas didirikan atas biaya yang diperoleh dari kontribusi Komunitas tertentu dan menjadi milik komunitas tersebut. Dapat memperoleh sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat (pasal 22 ayat 1 dan 2). Dilarang memperoleh bantuan dana awal mendirikan dan dana operasional dari pihak asing. Dilarang melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat (pasal 23).

Pemberlakuan UU 32/2002 seolah-olah memberikan angin segar terhadap radio komunitas, tetapi fakta yuridisnya justru mengeliminasi peran radio komunitas untuk dapat berperan lebih besar dalam kehidupan sosial. Agus Sudibyo<sup>1</sup> menganalogikan diskriminasi struktural terhadap radio komunitas itu sebagai "suku Aborizin" dalam dunia penyiaran kita, yang teralienasi dari hak dasarnya sebagai warga negara dan sebagai publik. Alienasi yang sebagian disebabkan oleh prosedur yang rumit untuk mengakses hak-hak dasar tersebut.

Latar belakang diskriminasi terhadap radio komunitas ini, menurut Sudibyo disebabkan santernya gerakan penolakan terhadap radio komunitas oleh kalangan radio swasta, bahwa keberadaan radio komunitas justru memperumit pengaturan frekwensi. Sehingga aksi-aksi *sweeping* yang dilakukan oleh Balai Monitoring dianggap jalan utama untuk mengamankan industri radio. Banyak cara telah dilakukan oleh radio komunitas, namun yang membuat kita trenyuh justru kalangan luar (internasional) yang lebih perhatian terhadap nasib radio komunitas. Salah satu yang ditulis Agus Sudibyo adalah keterlibatan CRI (*Combine Resource Institution*). CRI adalah sebuah NGO yang didanai oleh UNDP untuk mengembangkan sistem informasi berbasis komunitas yang menawarkan dua layanan. *Pertama*, memberikan asistensi teknis kepada pihak-pihak yang berkeinginan membangun radio komunitas. Untuk soal teknis ini CRI dan JRKI (Jaringan Radio Komunitas Indonesia) bekerjasama dengan CNRG

<sup>1</sup> Sudibyo, Agus. *Ekonomi Politik Media Penyiaran*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 251

(*Computer Network Research Group ITB*). Kedua, memberikan *training* dasar pengelolaan dasar bagi calon-calon pegiat radio komunitas, serta memberikan layanan lanjutan sebagai satu cara untuk meningkatkan kapasitas radio komunitas<sup>2</sup>.

Kontroversi terhadap keberadaan radio komunitas sesungguhnya sudah berlangsung ketika Undang-Undang Penyiaran disusun. Hal itu diungkapkan oleh Masduki (2007). Diungkapkan terdapat tiga materi yang menjadi kontroversi, yakni: (1) keberadaan lembaga penyiaran komunitas, (2) status TVRI dan RRI, (3) sistem penyiaran lokal-jaringan dan kepemilikan silang dalam lembaga penyiaran komersial. Menurut Masduki<sup>3</sup> terdapat dua kubu yang berbeda sikap. Pemerintah dan Asosiasi Penyiaran tidak setuju terhadap keberadaan penyiaran komunitas, sedangkan aktivis penyiaran dan PNASUS setuju. Sampai awal 2002 masalah lembaga penyiaran komunitas belum ada kesepakatan. Pemerintah bersikap menolak dengan alasan lembaga penyiaran komunitas memicu dis-integrasi bangsa. DPR dan aktivis penyiaran setuju dengan alasan UUD 1945 telah menjamin hak warga negara untuk berkomunikasi dan berskepresi bagi semua lapisan masyarakat. PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Suasta Nasional Indonesia) mengusulkan istilah yang dipergunakan adalah penyiaran pendidikan. PRSSNI tidak menolak penyiaran komunitas karena sesuai fakta di lapangan justru ikut membangun kebersamaan antar masyarakat.

Agus Sudibyo<sup>4</sup> menyatakan pemerintah yang didukung industri penyiaran membidani regulasi penyiaran yang justru menindas keberadaan penyiaran komunitas: alokasi frekwensi yang sangat terbatas dan ketidak pastian hukum dalam perizinan. Pemerintah juga mendelegitimasi radio komunitas sebagai penyiaran ilegal secara gencar dan tanpa kompromi melakukan aksi *sweeping* radio komunitas. Pemerintah juga melemahkan daya hidup radio komunitas dengan cara melemahkan daya pancar yang diperbolehkan, yakni hanya boleh bersiaran dengan radius 2,5 KM. Daya pancar 2,5 KM mungkin memadai untuk daerah perkotaan yang padat penduduknya, tapi tidak demikian untuk wilayah pedesaan di luar Jawa. Apa yang dilakukan oleh pemerintah ini menunjukkan bahwa pemerintah kita lebih berpihak kepada kepentingan komersial.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.250

<sup>3</sup> Masduki. *Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal*, (Yogyakarta, LKiS, 2007), hlm. 197

<sup>4</sup> Sudibyo, Agus. *Kebebasan Semu – Penjajahan Baru di Jagad Media*, (Jakarta, Penerbit buku KOMPAS, 2009), hlm.22



Seharusnya pemerintah menyadari bahwa radio komunitas sangat penting bagi masyarakat maupun negara. Bagi masyarakat radio komunitas merupakan media hiburan yang mudah diperoleh dan relatif dipercaya karena diadakan oleh warga komunitasnya sehingga masing-masing merasa memiliki media tersebut. Sedangkan bagi pemerintah, radio komunitas berpotensi menjadi media yang efektif untuk melakukan sosialisasi program-program pembangunan serta media informasi dalam rangka menyebarluaskan kegiatan-kegiatan pemerintah, ide-ide baru dan mobilisasi dalam rangka partisipasi masyarakat misalnya dalam rangka pemilihan pemimpin (*election*).

Penyelenggaraan radio komunitas, disamping memadukan komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa, bahkan memungkinkan dirajut dengan komunikasi menggunakan media sosial (*social media*), dan melibatkan warga dalam produksi pesan serta penyebarluasannya. Pada fenomena media sosial, saat ini bukan hal sulit lagi, sebab dengan perangkat telepon genggam (*celular phone*) saja sudah dapat memproduksi pesan dan menyebarkannya ke seluruh anggota komunitas. Sedangkan fenomena keterlibatan warga masyarakat dalam mencari informasi (*news gathering*), menyusun pesan (*news writing*), dan sekaligus *exposing* sering disebut dengan "jurnalisme warga" (*citizen journalism*).

Term *citizen journalism* dipakai untuk menjelaskan keterlibatan warga (*audiences*) dalam memproduksi dan mendistribusikan berita. Beberapa literatur menyebutkan bahwa aktivitas warga dalam mempublikasikan informasi tersebut bisa diwakili oleh term seperti *public journalism*, *civic journalism*, *grassroots journalism*, *participatory journalism*, *street journalism* hingga *audience journalism*. Keterlibatan warga ini tak terlepas dari kemajuan teknologi komunikasi yang memungkinkan siapa pun terlibat di dalam produksi, konsumsi berita, didukung pula dengan munculnya beberapa fasilitas dalam internet seperti *mailing list*, *weblog*, *social networking sites* atau *website* itu sendiri<sup>5</sup>.

Demikianlah eksistensi radio komunitas yang berada dalam dilema, di satu sisi menghadapi kontestasi (persaingan) dengan lembaga penyiaran lain (radio swasta dan televisi), sedangkan di sisi lain harus berjuang mengikuti regulasi negara yang membatasi ruang kreativitasnya.

Studi tentang kontestasi penyiaran dapat kita temukan misalnya dalam disertasi Henry Subiakto (2010) tentang gejala kontestasi sudah dimulai sejak Undang Undang Penyiaran disusun, yang disebut

<sup>5</sup> Nasrullah, Rulli. *Teori dan Riset Media Siber*. (Jakarta, Kencana Prenada Mediagroup, 2012), hlm.148-149

sebagai “kontestasi wacana” atau tarik menarik interpretasi mengenai bagaimana demokratisasi sistem penyiaran menurut aparaturnya Negara, masyarakat sipil dan kalangan kapitalis pelaku bisnis media. Dalam kontestasi ini kalangan kapitalis pelaku bisnis media disebut sebagai pemenangnya. Melalui para praktisi media melakukan uji metari (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan beberapa pasal yang merugikan tersebut. Mereka berasal dari IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI), Persatuan Sulih Suara Indonesia (PERSUSI), Komnitas Televisi Indonesia (KOMTEVE), memberi kuasa kepada Dr. Todung Mulya Lubis, S.H, dan lainnya untuk mengajukan gugatan ke MK.

Hasilnya pada tanggal 28 Juli 2004 Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, yakni.... menyatakan bahwa pasal 44 ayat (1) untuk bagian anak kalimat “... atau terjadi sanggahan”. Pasal 62 ayat (1) dan (2) untuk sebagian anak kalimat “...KPI bersama...” Undang Undang No.32 tahun 2002 bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. maka setelah periode ini Pemerintah secara sendirian berhak menyusun PP atas UU penyiaran. Maka lahirlah Peraturan Pemerintah (PP) yang isinya didominasi oleh kepentingan pemerintah dan keberpihakkannya kepada Industri<sup>6</sup>.

Dari *Judicial review* ini, kontroversi semakin nyata. Pemerintah menyusun PP 11, PP12, PP13, 14, PP 49, 50,51, dan 52 tahun 2005 tanpa melibatkan KPI. PP 11,12,dan 13 tahun 2005 mengatur Pedoman Penyelenggaraan Penyiaran Publik, RRI, dan TVRI. PP 49 tahun 2005 mengatur Pedoman Penyelenggaraan Penyiaran Asing, PP 50 tahun 2005 tentang Penyiaran Swasta, PP 51 tentang Penyiaran Komunitas, PP 52 Penyiaran berlangganan.

Bimo Nugroho Sekundatmo dalam tesis masternya di Universitas Indonesia melakukan studi kontestasi ini dalam konteks ekonomi politik penyiaran (2006) menyimpulkan bahwa Pemerintah hanyalah kaki tangan pemilik modal yang sudah mapan dalam industri media. Bimo Nugroho membenarkan bahwa Negara adalah alat dari kelas pemilik modal untuk menghisap kelas proletar yang tertindas.

Fenomena radio komunitas berjaringan di Tulungagung merupakan fakta sosial yang menarik untuk diteliti, karena berkat “inovasi” dalam manajemen penyelenggaraan penyiaran yang

---

6 Panuju, Redi. *Sistem Penyiaran Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Mediagroup, 2017), edisi kedua, hlm.100.

dilakukan membuat sistem berjaringannya berhasil. Radio komunitas diakui keberadaannya oleh masyarakat dan pemerintah setempat, mandiri dalam modal kapital dan pemerintah memberi toleransi. Secara yuridis, konsep berjaringan dalam penyiaran baru dikenal dalam penyelenggaraan siaran televisi melalui sistim yang disebut SSJ (Sistem Siaran Jaringan). Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari hasil observasi dan wawancara yang mendalam terhadap beberapa informan yang berasal dari pengurus perkumpulan radio komunitas Madu FM, penanggung jawab siaran, dan penyiar Radio di Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

### **Karakteristik Sosiologis Radio Komunitas**

Menurut Masduki (2006), meskipun dikenal luas di Amerika Latin dan Eropa, istilah radio komunitas atau *Community Radio*, baru populer di Indonesia paska jatuhnya Orde Baru tahun 1998 dan mencapai klimak ketika terjadi perdebatan perlunya revisi UU Penyiaran Nomor 24/1997. "Komunitas" adalah pilihan dari sejumlah penyebutan lain untuk radio yang berbasis sangat lokal dan non-profit, diantaranya: (1) Radio Alternatif, alternatif dari dua model penyiaran yang hanya melayani propaganda negara (*state oriented*) dan melayani kepentingan pengusaha (*market oriented*) melalui radio, (2) Radio Pendidikan, antitesis dari fungsi radio yang hanya mendiseminasikan informasi dan menyuguhkan hiburan semata, (3) radio Swadaya, merujuk ciri khas radio yang mengandalkan sikap militansi, ketulusan dan independensi Pengelolanya dan (4) Radio Komunitas, merujuk pemilikan dan wilayah orientasi yang melokal sebagai antitesis radio swasta yang meluas dan berjaringan.

Bila lembaga penyiaran komunitas bertumpu pada orientasi kapital, keberadaannya mencari laba, maka radio komunitas berorientasi nir-laba. Orientasi radio komunitas adalah menjalin partisipasi aktif warga sekitar yang disebut komunitas. Bahkan sering disebut bahwa kinerja radio komunitas dapat diukur dari seberapa besar mampu menggalang partisipasi aktif warga sekitar. Partisipasi berarti melibatkan diri (aktif) bukan ikut serta (pasif). Pada komunitas yang heterogen dalam hal umur, pendidikan, pekerjaan dan strata ekonomi, bentuk partisipasi akan heterogen. Radio komunitas yang melayani segenap kelompok sosial dalam komunitas merumuskan bentuk partisipasi yang berbeda, tidak seragam agar setiap individu berpeluang bergabung tanpa merasa kecil kontribusi siarannya.

Jika ia pengusaha atau pejabat publik, dukungan berbentuk dana dan kebijakan lebih tepat; jika pendidik atau pelajar, maka ia tepat menjadi pengelola dan pendamping siaran<sup>7</sup>. Hal itu pula yang disebut oleh Fraser<sup>8</sup>, bahwa partisipasi aktif warga merupakan karakteristik sosiologi media ini. Dengan metode siaran interaktif, pendengar bersemangat menyimak siaran, penyiar merasa mendapatkan penghargaan dan stasiun radio-pun menjadi radio komunitas dalam makna yang sesungguhnya.

Dalam pendirian radio komunitas, urgensinya harus mengacu pada dua aspek; (1) jaminan keberadaan komunitas secara permanen di lingkup batas geografis tertentu yang bersedia aktif dalam mengelola radio (2) peluang partisipasi tiap individu di komunitas secara setara baik dalam pemilikan, produksi siaran maupun selaku pihak pendengar yang harus terlayani hak dan kepentingannya. Semakin kecil cakupan geografis radio semakin banyak individu yang terlayani sebagai subyek siaran, *covering* isu-isu lokal merata. Radio yang luas cakupan siarannya akan cenderung elitis dan makin sulit dikontrol oleh tiap individu pendengar<sup>9</sup>.

Tabing (1988) merumuskan lima karakteristik radio komunitas dalam konteks sosial yaitu: (1) Ia berskala lokal, terbatas pada komunitas tertentu; (2) Ia bersifat partisipatif atau memberi kesempatan setiap inisiatif anggota komunitas tumbuh dan tampil setara sejak proses perumusan acara, manajerial hingga pemilikan; (3) Teknologi siaran sesuai dengan kemampuan ekonomi komunitas bukan bergantung pada bantuan alat pihak luar; (4) Ia dimotivasi oleh cita-cita tentang kebaikan bersama dalam komunitas bukan mencapai tujuan komersial; dan (5) Selain mempromosikan masalah-masalah krusial bersama, dalam proses siaran radio komunitas harus mendorong keterlibatan aktif komunitas dalam proses mencari solusinya<sup>10</sup>.

Karakteristik sosiologis radio komunitas dapat ditinjau lagi berdasarkan indikator indikator tertentu misalnya; siapa yang mengambil banyak inisiatif (inisiasi), lembaga payungnya, prinsip penyusunan program siaran yang dilakukan, lingkup wilayah (jangkauan wilayah), dan bagaimana kualitas pengelolaannya. Indikator indikator tersebut berbeda beda antara radio komunitas yang

---

<sup>7</sup> *Perkembangan dan Problematika Radio Komunitas di Indonesia*, Jurnal Ilmu Komunikasi, volume 1, nomor 1, Juni 2006 (ISSN : 1829-6564).

<sup>8</sup> Fraser, Colin dan Restrepo Estrada, Sonia. *Buku Panduan Radio Komunitas*. (Jakarta, UNESCO Jakarta Office, 2001)

<sup>9</sup> Masduki, *op.cit*, hlm. 150

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 150

satu dengan lainnya tergantung basis yang dimiliki. Temuan lain dari penelitian Masduki di atas adalah radio komunitas umumnya dikelola tidak serius, tergantung pada informal leader setempat, peralatan atau infrastruktur yang minim, dan sumber dana yang sangat terbatas.

Dalam pengelolaan sehari-hari, stasiun radio berjalan dengan mengandalkan *informal leader* seperti tokoh pemuda, pemilik rumah yang ditempati studio radio, perintis yang aktif menjalankan penyiaran sehari-hari. Ketergantungan terhadap mereka cukup tinggi, meskipun hampir seluruh stasiun radio memiliki struktur organisasi yang jelas. Manajemen operasional umumnya sangat sederhana, belum ada sistem perencanaan dan evaluasi siaran yang baik maupun pembagian tugas dalam menjalankan stasiun sehari-hari. Dalam hal produksi siaran, manajer stasiun terlibat langsung. Kearsipan administrasi siaran dan keuangan belum jadi perhatian mayoritas radio, apalagi pengelolaan dana. Karena keterbatasan sumber pemasukan dana, sebagian besar dana operasional dan pemeliharaan alat ditunjang donasi pribadi para pengelola ditambah pemasukan iklan. Dengan kondisi tersebut, bisa dipahami pengelolaan keuangan belum menjadi perhatian utama mereka<sup>11</sup>.

Ketergantungan pada figur *informal leader* mempengaruhi konsistensi siaran setiap hari. Siaran dapat saja tidak berjalan ketika pimpinan non-aktif. Meskipun tidak sulit merekrut penyiar dan reporter, stasiun radio kesulitan mengelola SDM karena sifat kerja yang sukarela dan ketrampilan siaran yang minim. Umumnya, SDM yang terlibat hanya mampu bertahan 3-12 bulan saja<sup>12</sup>.

Dari aspek pendanaan, mayoritas radio komunitas tidak memiliki rencana anggaran yang baik, pengelolaan administrasi keuangan dilakukan manual. Sumber utama pendapatan adalah penjualan kartu pilihan pendengar, disusul iklan layanan bisnis warga yang dikenakan biaya rata-rata Rp 50.000,00 perbulannya untuk penyiaran iklan setiap hari, sumbangan pribadi-pribadi anggota komunitas dan sumbangan resmi yang diperoleh dari kas pemerintah desa setempat atau organisasi forum warga yang menaungi radio. Ke depan, beberapa pengelola radio berniat memperkuat sektor pendapatan iklan, disamping kartu pendengar.

---

11 *ibid.*, hlm. 155

12 *Ibid.*, hlm.156

## Peranan Radio Komunitas dalam Pembangunan

Peranan kuat media massa dalam pembangunan diperlihatkan dalam penelitian Lerner dan Rao dan studi studi lain pada tahun 1950-an dan 1960-an. Studi studi ini melengkapi hipotesis paradigma pembangunan dominan. Media massa merupakan alat untuk mentransfer gagasan gagasan dan model model baru dari negara negara berkembang ke negara negara Dunia Ketiga dan dari daerah daerah. Schramm menjelaskan bahwa desa-desa tidak menyadari pola-pola tradisional mereka. Tuntutan untuk berkembang secara ekonomis dan sosial biasanya berasal dari melihat bagaimana negara negara berkembang atau orang orang yang lebih beruntung. Media massa kemudian menjadi jembatan ke dunia yang lebih luas. Mereka diberi tanggung jawab untuk mempersiapkan individu-individu untuk perubahan yang lebih cepat di negara- negara berkembang dengan menetapkan "iklim organisasi". Demikian pendapat Everret M Rogers (1991) sebagaimana dikutip oleh Rochajat Harun & Elvinaro Ardianto<sup>13</sup>.

Wilbur Schramm menambahkan bahwa ada beberapa tugas yang dapat dilakukan media massa, namun ada pula yang tidak. Schramm menguraikan tugas-tugas tersebut secara rinci. Dalam tugasnya menjangkau serta mempengaruhi *audiences*, penggabungan media massa dengan komunikasi antar pribadi merupakan sarana yang paling efektif untuk : (1) Menjangkau masyarakat dalam usaha memperkenalkan ide baru dan (2) Membujuk masyarakat agar memanfaatkan inovasi tersebut. Dalam sejarahnya penggabungan pendekatan tersebut menghasilkan apa yang disebut dengan "forum media". Forum media untuk pertamakalinya berkembang di Kanada di tengah keluarga petani, kemudian menyebar ke Jepang serta negara negara sedang berkembang seperti India, Nigeria, Ghana, Malawi, Costarica, dan Brazillia. Forum media berlangsung dengan cara mengumpulkan sekelompok kecil anggota masyarakat, yang bertemu secara teratur dalam waktu waktu tertentu untuk menangkap siaran media massa, kemudian mendiskusikan isi siaran tersebut. Media massa duhubungkan dengan forum tersebut melalui radio<sup>14</sup>.

Dalam uraian di atas mengenai pemanfaatan forum media

---

13 Harun, Rochajat & Elvinaro Ardianto, 2011, *Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosial*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm.130

14 Depari, Edward & Collin MacAndrews. *Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, cet ke-8, 2006), hlm. 29

ternyata media massa seperti radio merupakan saluran utama dalam menyebar luaskan pesan-pesan pembangunan seperti inovasi kepada kelompok-kelompok diskusi. Tampaknya siaran-siaran melalui forum media cukup efektif dalam menambah pengetahuan, pembentukan dan perubahan sikap, serta mendorong perubahan. Pengaruh komunikasi melalui media massa di negara-negara berkembang, khususnya di masyarakat desa, akan menjadi lebih besar apabila media tersebut digabung perannya dengan saluran komunikasi pribadi melalui forum media<sup>15</sup>.

Model-model penggunaan media radio untuk tujuan-tujuan pembangunan seperti tersebut di atas, nampaknya sesuai dengan peran yang selama ini dilakukan di Indonesia. Pada masa lalu, forum media seperti yang dimaksudkan oleh Schramm telah diaplikasikan oleh jajaran Departemen Penerangan dan Departemen Pertanian dengan program Kelompen Cahir (Kelompok Pendengar, pembaca, dan Pemirsa). Program-program penyuluhan di bidang pertanian dan peternakan telah terintegrasikan dalam siaran radio dan kelompok-cahir. Presiden Soeharto bahkan sempat belajar terlebih dahulu mengenai ternak Lele Dumbo dan Lamtoro Gung ketika akan menghadapi forum media dalam acara "Temu Wicara" yang diadakan TVRI dan RRI.

Hal senada terlihat juga pada program-program pembangunan di pedesaan yang dirancang pemerintah membutuhkan penyuluhan dan efektifitasnya sangat ditentukan oleh penggunaan media massa yang tepat. Diungkapkan oleh Leta Rafael Levis<sup>16</sup> bahwa penyebaran berita, informasi, propaganda serta pertunjukan-pertunjukan dalam rangka melakukan perbaikan atau perubahan-perubahan dalam pembangunan teknologi pertanian, semakin sangat penting dengan perkembangan alat canggih dalam teknologi komunikasi. Di negara-negara maju, sangat sedikit para petani yang bekerja tanpa penggunaan jasa radio dan televisi. Radio dan televisi sering menyiarkan program-program yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan usaha pertanian, keadaan cuaca, jenis tanaman unggul yang baru dikembangkan serta informasi lain yang berguna bagi usaha pengembangan tani di pedesaan. Aspek difusi teknologi baru ke dalam masyarakat juga sangat penting dan berguna bagi para petani untuk merangsang mereka mengadakan perubahan-perubahan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm.31

<sup>16</sup> Levis, L.R. *Sistem Komunikasi dan Adopsi Inovasi Panca Usaha Tanaman Kedelai. Suatu Studi Kasus di Kecamatan Kupang* dalam Redi Panuju, *Sistem Penyiaran Indonesia*, (Jakarta, Kencana: 2017), hlm.146

dalam penggunaan teknologi. Selain menyebarkan berita-berita atau informasi yang berhubungan dengan pertanian, radio dan televisi juga menyebarkan program-program lain yang berguna bagi rumah tangga petani.

Selanjutnya Levis, L.R menemukan fakta bahwa rendahnya frekwensi penggunaan media oleh para petani menyebabkan kesadaran yang rendah dalam melaksanakan teknik bercocok tanam yang benar. Media komunikasi radio di daerah tersebut masih merupakan barang asing, belum merupakan media pilihan yang menguntungkan para petani dalam mengembangkan usaha tani mereka. Para petani di lokasi penelitian tidak dapat menggunakan media radio karena mata acara "Siaran Pedesaan" di RRI dan TVRI dari aspek waktu sangat sulit diikuti oleh para petani sebab waktu penyiaran pukul 05.30 WITA bertepatan dengan waktu tidur dan sebagian petani lainnya sudah keluar rumah untuk mencari makan ternak<sup>17</sup>.

Setidaknya penelitian tersebut menunjukkan pentingnya kehadiran informasi pertanian dan sisi kehidupan sosial di pedesaan dalam mendinamisasi kelompok-kelompok masyarakat pedesaan. Sayangnya sebelum tahun 2002, media yang mendapat akses dari negara untuk melakukan siaran pedesaan dimonopoli oleh RRI dan TVRI, sedangkan media lokal cenderung (bahkan wajib) melakukan siaran "reley". Dari aspek isi pesan (*content*) menyebabkan konteks pesan terpusat berdasarkan cara pandang Jakarta. Hal tersebut dirasakan mengurangi ekspose konten lokal (*local content*) dan cara berpikir masyarakat setempat.

Apalagi pada penghujung tahun 1990an, forum temu wicara ini cenderung banyak diarahkan ke ranah politik oleh pemerintah untuk kepentingan *status quo*. Sehingga ketika reformasi bergulir, model forum media itu ikut terhempas. Peran tersebut menemukan muaranya pada model hubungan media-komunitas pada radio komunitas sesuai UU 32/2002.

Pergeseran pemanfaatan media radio sebagai media komunikasi pembangunan seperti diatas dapat dijelaskan dari sudut pandang politik media. Konsep politik media sebagai kebijakan negara sangat berkaitan dengan horizon nilai yang terkandung dalam sebuah penataan media, yang pada akhirnya menentukan orientasi makro kebijakan media. Hermin Indah Wahyuni mengutip Gehard Vowe merumuskan 3 horizon nilai dominan dalam penataan media<sup>18</sup>, yaitu : (1) Nilai

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 147

<sup>18</sup> Wahyuni, Hermin Indah, *Politik Media dalam Transisi Politik : dari Kontrol Negara Menuju Self Regulation Mechanism*, Jurnal Ilmu Komunikasi



keamanan (*security*) politik media seharusnya mampu menjamin terciptanya rasa aman dalam masyarakat. Melindungi masyarakat dari bahaya yang mengancam akibat keterbukaannya dan kebebasan menyampaikan informasi melalui media massa, banyak dipraktekkan di negara negara yang menggunakan tradisi etatisme dan korporatisme (contoh: Jerman, Austria); (2) Nilai kebebasan (*freedom*) politik media seharusnya menjamin terwujudnya media massa sebagai sebuah arena publik yang dapat digunakan oleh seluruh kelompok kelompok dalam masyarakat untuk menyampaikan ide dan pemikiran mereka yang terkait dengan kepentingan publik. Banyak dipraktekkan oleh negara negara Anglo Saxon (Amerika, Kanada, Australia, dan Inggris) dan (3) Nilai keadilan (*equality*) politik media seharusnya dapat dirasakan pengaruhnya oleh seluruh kelompok kelompok dalam masyarakat secara optimal, media diharapkan memperkecil kesenjangan dalam masyarakat. Banyak dipraktekkan di negara negara skandinavia. Menurut Hermin, dalam kasus Indonesia yang sedang bertransisi dari politik otoritarian menuju demokrasi, media massa akan berusaha mencari format yang tepat untuk menjalankan fungsinya di masyarakat.

Menurut penulis, radio komunitas justru berada di persimpangan jalan antara peran yang diharapkan oleh regulasi menjadi penopang kohesivitas sosial dengan kontrol yang kuat dari pemerintah (negara) dalam urusan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) dan kontrol dari Komisi Penyiaran dalam urusan isi siaran (*content*), sementara dirinya sendiri harus berjuang secara mandiri menghidupi organisasinya dan komunitasnya. Kehadiran radio komunitas di tengah masyarakat pedesaan dapat menjadi sarana komunikasi antar komunitas, maupun dengan kalangan luar, bahkan bisa menjadi medium mengintegrasikan kelompok kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan kegiatan bersama atau mencapai tujuan tujuan tertentu.

Meskipun radio komunitas memiliki keterbatasan-keterbatasan sosiologis maupun yuridis, namun perkembangan teknologi dewasa ini dapat menutupi kekurangan kekurangan tersebut. Perkembangan teknologi informasi dan komputer memberi kesempatan anggota masyarakat menciptakan model komunikasinya melalui perangkat teknologi yang disinergikan. Dewasa ini di radio radio komunitas sudah memadukan antara teknologi audio yang berbasis frekwensi dengan teknologi internet yang berbasis *cyber optic*, yakni memanfaatkan teknologi konvergensi seperti radio *streaming*. Sehingga model

komunikasi yang tercipta atau diciptakan oleh radio komunitas bisa mewadahi komunikasi antar pribadi (*interpersonal communication*) bermedia, komunikasi kelompok (*group communication*), maupun komunikasi massa (*mass communication*).

## Strategi Menghadapi Keterbatasan

Menghadapi marginalisasi terhadap radio komunitas, Ali Masjkur<sup>19</sup> menyatakan tidak memperlakukan peraturan yang menyebabkan radio komunitas terpinggirkan (marginalisasi). Ia menyatakan :

“Pesantren niku pusate politik. Jalan terus mawon, mangke parturane kan mengikuti kito he he he.”<sup>20</sup> (terjemahannya : Pesantren itu pusatnya politik. Semua jalan saja dulu, nanti peraturannya akan mengikuti).

Sepintas sikap Ali Masjkur menunjukkan perlawanannya terhadap regulasi penyiaran, namun temuan di lapangan menunjukkan bahwa Komunitas Madu yang berlatar belakang pesentren itu mencoba melakukan kreasi untuk memberdayakan komunitasnya dan tujuan dakwah. Meskipun pada akhirnya upaya keluar dari marginalisasi dilihat dari persepektif “konflik” merupakan perbuatan yang melawan undang undang di satu sisi dan memanfaatkan celah (yang belum diatur dalam undang undang) pada sisi yang lain. Dari celah regulasi, radio Madu FM justru mempunyai banyak ide sebagai strategi agar radionya dapat eksis, yaitu bisa mendatangkan kapital untuk biaya operasional dan mengembangkan jaringan radio komunitas. Dengan demikian, wilayah dakwahnya semakin meluas.

Strategi merupakan cara yang dilakukan untuk mengatasi keterbatasan, marginalisasi dan persaingan agar tetap eksis. Strategi yang dilakukan rakom Madu FM antara lain:

---

<sup>19</sup> Ali Masjkur adalah pendiri Radio Komunitas Madu FM Tulungagung, wawancara 23 Agustus 2016

<sup>20</sup> Bahasa Jawa

Tabel 1  
Strategi Radio Komunitas menghadapi Keterbatasan

No	Keterbatasan	Strategi	Keterangan
	Keterbatasan Jangkauan Siaran	Membuat Jaringan Radio Komunitas	<p>Radio Komunitas hanya boleh bersiaran dalam radius 2,5 dari pusat siaran. Rakom Madu FM mendirikan lembaga penyiaran komunitas di beberapa daerah yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Setiap lembaga penyiaran diuruskan perizinannya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim. Lembaga lembaga tersebut antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MaduFM Trenggalek</li> <li>• MaduFM Ponorogo</li> <li>• MaduFM Malang</li> <li>• MaduFM Pujon</li> <li>• MaduFM Pasuruan</li> <li>• PT.KALIGAFM Tuban</li> <li>• MaduFM Gresik</li> <li>• MaduFM Pasuruan</li> <li>• MaduFM Ngajuk</li> <li>• MaduFM Blitar</li> <li>• MaduFM Bojonegoro</li> <li>• PT.SAGA FM Trenggalek</li> <li>• MaduFM Ngawi</li> <li>• MaduFM Madiun</li> <li>• MaduFM Mojokerto</li> <li>• MaduFM Tuban</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT.MDSFM Tulungagung</li> <li>• MaduFM Bangkalan</li> <li>• MaduFM Driyorejo Gresik</li> <li>• MaduFM Waru Sidoarjo</li> <li>• MaduFM Batu Malang</li> <li>• MaduFM Pacitan</li> <li>• (Sumber: data skunder dari Rakom Madu FM)</li> </ul>
2	Keterbatasan Frekwensi	Memanfaatkan Streaming	Radio Komunitas hanya diberi 3 kanal dalam satu kecamatan, yaitu 107.7 M.Hertz, 107.8 M.Hertz, dan 107.9 M. Herz. Radio Komunitas Madu FM memanfaatkan teknologi streaming berbasis internet (dikenal dengan istilah radio on-line). Melalui radio versi streaming ini dapat menghubungkan dengan para tenaga kerja lokal yang ada di luar negeri. Mereka memberi sumbangan uang kepada Madu FM
3	Larangan Memutar Iklan Komersial	Memodifikasi Iklan Layanan Masyarakat disponsori produk/intansi tertentu	Madu FM menjalin kerjasama dengan produk produk lokal dan Dinas dinas pemerintahan Tulungagung.

		<p>Menyediakan durasi (waktu) kepada instansi pemerintah untuk bersiaran di radionya</p> <p>Memfaatkan web-site</p>	<p>Instansi pemerintah mengisi acara berupa sosialisasi program pembangunan, kemudian memberi bantuan dana sebagai dana operasional.</p> <p>Siaran radio Madu FM sebagian diup-load ke web-site. Pemasang iklan radio tertarik memasang iklan di versi web-site-nya.</p>
4	Keterbatasan income	<p>Mengadakan kegiatan off-air berupa :</p> <p>Jalan sehat, pengajian, shalawatan<sup>21</sup>, sunatan masal, kursus menjahit, kursus masak, mocopatan<sup>22</sup>, nderes kitab kuning<sup>23</sup>, dan pameran bekerjasama dengan pemerintah daerah</p>	<p>Peserta memberikan kontribusi berupa dana dan produk yang ikut menjadi sponsor. Sponsor bisa dalam bentuk spanduk, baliho, ataupun backdroup di belakang panggung.</p>

Sumber : Wawancara dengan Ali Masjukur Ketua Rakom Mafu FM (18 Juli 2015) dan dokumen Madu FM, 2015

<sup>21</sup> Shalawatan adalah tradisi memuji muji Nabi Muhammad SAW dalam bentuk nyanyian.

<sup>22</sup> Mocopatan adalah menyanyikan lagu lagu yang berisi ajaran hidup, moralitas, dan etika sosial.

<sup>23</sup> Nderes Kitab Kuning adalah mengkaji kandungan kitab kitab tentang

Beberapa temuan sebagaimana tersebut di atas memperlihatkan terjadinya saling menyesuaikan (adaptasi) antara perubahan kebiasaan dalam penggunaan media (pola penggunaan media) dengan perubahan dalam manajemen media. Para pengelola media berusaha menyesuaikan diri dengan tradisi bermedia yang terjadi di masyarakat. Kebiasaan yang semula cenderung hanya menggunakan satu sumber utama berubah menjadi menggunakan berbagai saluran media, mulai media cetak, radio, televisi, sampai dengan sumber dari media on-line. Maka Madu FM sebagai bagian dari sistem media, mau tidak mau, harus memanfaatkan berbagai saluran untuk memenuhi kebutuhan khalayak.

Temuan ini sesuai dengan yang diuraikan para pakar Sosiologi Komunikasi, perubahan tabiat bermedia membawa implikasi sosial diantaranya, secara operasional masyarakat (termasuk masyarakat media) terstruktur secara fungsional yang oleh de Fluer dan Ball-Rokeach<sup>24</sup>, dijelaskan dimana masing masing bagian masyarakat saling berhubungan secara dinamis. Dan setiap bagian tersebut harus melakukan kegiatan yang mengundang pada pencapaian harmoni sosial. Pandangan yang demikian, oleh Oetomo disebut sebagai "pendekatan struktural media"<sup>25</sup>. Pendekatan ini beranggapan bahwa media diperlukan untuk menjaga kesinambungan sistem sosial masyarakat industri yang berskala besar<sup>26</sup>. Berbagai kegiatan media harus terkait dengan "keperluan" masyarakat, terutama berkenaan dengan peranan media dalam menjaga kesinambungan, ketertiban, persatuan, motivasi, pengarahan, dan penyesuaian<sup>27</sup>

Melalui dunia maya, sesungguhnya warga komunitas sangat diuntungkan karena dapat mengakses materi siaran radio yang tertunda atau tidak dapat mendengarkan pada saat materi tersebut diudarakan. Internet memungkinkan siaran radio terdokumentasi secara baik, dan memberi kebebasan untuk mengakses bagi publik. Dengan demikian, disamping publik diberi keleluasaan waktu untuk mengakses sesuai kesempatan yang dimiliki, juga diberi keleluasaan untuk memilih materi apa yang diakses sesuai kebutuhan, minat, dan ketertarikannya. Berbeda dengan mendengar langsung radio siaran,

---

fikih dan akidah yang biasanya dilakukan di pesantren pesantren.

24 De Fluer, Martin & Sandra Ball-Rokeach, 1988. *Teori Komunikasi Massa*, (edisi Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988), hlm.20

25 Oetomo, Mochtar W, "Wajah Buruh di Media Massa-Sistem Konservasi, Hegemoni, dan Kekerasan Semiotik", Jurnal GERBANG, No.08, volume 03, tahun 2000, hlm.64

26 McQuali, Denis. *Mass Communication Theory*, (Jakarta, 2011, Salemba Humanika), hlm. 109

27 Oetomo, *op.cit*, hlm 65.

khalayak tidak memiliki kesempatan memilih. Sifat radio sikilas dengar, artinya begitu diudarakan tidak bisa diputar ulang. Namun, dengan teknologi internet ini karakteristik tersebut berubah, bisa diputar ulang, bahkan khalayaklah yang menentukan.

Jejaring on-line terbukti mampu memindahkan konsep *public spear* fisik ke jejaring maya. Disebut maya, karena komunikasi mereka cenderung berdasarkan representasi pesan di ranah digital. Realitas empiris belum tentu seperti yang ditampilkan dalam representasi (dalam perspektif kritis Baudrillard disebut sebagai realitas virtual, realitas visual atau realitas imajiner).

Temuan di atas kiranya sangat relevan bila dianalisis dengan pendekatan teori Pilihan Rasional. Ciri yang lain teori Pilihan Rasional adalah menggeser asumsi asumsi yang semula diyakini teori teori ekonomi klasik sebagai sebuah kebenaran. Asumsi teori ekonomi mikro klasik menyatakan bahwa individu individu harus bisa memaksimalkan pendapatan digeser menjadi banyak sasaran egoistik dan altruistik yang mampu mengarahkan perilaku. Jane Mansbridge<sup>28</sup> membuat analisis model "inklusif" menyatakan bahwa kepentingan diri sendiri merupakan satu satunya motif dan penggerak perilaku. Individu bersedia bekerja dengan motif apa pun asalkan dapat memaksimalkan hasil selevel dengan pendapatan. Istilah yang diberikan untuk perspektif ini adalah individu bersedia bertindak dengan motif apapun asal bisa optimasi. Bahkan disebut Ritzer<sup>29</sup> merupakan titik diferensiasi (pembeda) yang esensial antara teori pilihan rasional dengan teori tradisional dalam ekonomi. Pada akhirnya teori Pilihan Rasional tertarik menjelaskan bagaimana tindakan individu dalam masyarakat yang berhubungan dengan dilema dilema. Preferensi tindakan cenderung berdasarkan pertimbangan pada sesuatu yang dapat mengoptimasi kepentingan dan egoistiknya<sup>30</sup>.

Pada awal membentuk jaringan Rakom, sesungguhnya Madu FM juga sudah menghadapi dilema, yakni antara menfokuskan diri pada komunitas khusus di Campur Darat atau meluaskan wilayah dakwahnya. Egoistiknya muncul, bila hanya dakwah di komunitas Campur Darat, maka outcomenya hanya dalam satu kecamatan saja. Sebagai pegiat Aswaja, egoistiknya itu bergeser, menjadi egoistik yang lebih luas. Dari egoistik geografis begeser ke egoistik man haz.

<sup>28</sup> Mansbridge, Jane J. *Beyond Self-Interest*, (Chicago, University of Chicago Press, Chicago, 1990), hlm. 20

<sup>29</sup> Ritzer, Goerge & Barry Smart, *Handbook of Social Theory*, (Terjemahan Imam Muttaqien dkk), cetakan ke-2, ( Bandung, Nusa Media, 2012), hlm. 546

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 549-56

Demikian juga ketika mendirikan LPS, tentulah berangkat dari harapan akan mendapat keuntungan kapital darinya, sebab LPS diperbolehkan mendapatkan pendapatan dari iklan komersial, tetapi ternyata harapannya itu meleset.

Maka yang dilakukan Madu FM adalah mengoptimalkan apa yang sudah ada, termasuk mensubsidi silang antara Madu FM yang swasta dengan Madu FM yang komunitas. Kegagalan mencari sumber ekonomi dari LPS tidak membuat surut Madu FM, justru menimbulkan ide ide baru untuk bisa mengoptimalkan media yang ada, yakni dengan mendirikan Madu TV, mengoptimalkan internet, dan kegiatan off-air.

Dalam hal ini menjadi mirip seperti yang ditulis ahli Filsafat Komunikasi Astrid S Susanto<sup>31</sup> bahwa media massa dapat membentuk struktur sosial yang baru secara cepat dan harmonis dengan (a) menjadikan dirinya alat pengikat ataupun perantara dalam perubahan yang semakin renggang ikatannya, (b) menyadarkan masyarakat luas akan perubahan struktur yang diperlukan oleh masyarakat tradisional agar ia mampu bertahan dan menghadapi abad ke-21.

## Penutup

Temuan penelitian ini banyak menunjukkan gejala yang dapat dijelaskan melalui asumsi-asumsi dalam teori strukturalisme fungsional. Kontestasi penyiaran merupakan fenomena yang sarat dengan konflik antar berbagai kepentingan. Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) terbukti menjadi korban perundangan yang mendeskreditkan keberadaannya, mulai dari ketersediaan/alokasi kanal, wilayah layanan, perizinan, sampai restriksi terhadap akses ekonomi. Sementara beban kewajibannya sangat besar. Namun, sebagaimana dijelaskan dalam teori strukturalisme fungsional, konflik-konflik tersebut berusaha diselesaikan sendiri oleh internal dalam sistem penyiaran. Yang terjadi kemudian masing masing pihak beradaptasi terhadap situasi dan kondisi sehingga mencapai kesepakatan-kesepakatan tertentu, sampai akhirnya Rakom yang semula diperhitungkan akan terpuruk, justru menemukan situasi yang kondusif untuk berkembang. Dalam persepsktif struktural fungsional dapat dijelaskan hal tersebut terjadi karena masing masing melakukan upaya untuk mencapai keseimbangan tertentu (equilibrium) melalui

---

<sup>31</sup> Susanto, Astrid S, 1986. *Filsafat Komunikasi*, (Bandung, Bina Cipta, cet ke-3, 1986). hlm.34



adaptasi-adaptasi tertentu. Perubahan-perubahan yang terjadi dan transformasi di Rakom Madu FM terjadi sebagai akibat ketegangan-ketegangan, di satu sisi radio komunitas menghadapi keterbatasan-keterbatasan internal, sisi yang lain ruang geraknya dipersempit dan masih ditambah beban kewajiban oleh negara. Namun perubahan dan transformasi tersebut dilakukan mengikuti urutan-urutan yang tertib. Pilihan rasional mendorong perilaku kepentingan egoistik mengalahkan kepentingan ekonomik. Fakta lainnya yang memperkuat teori ini adalah partisipasi warga dalam memasang iklan di Rakom karena keyakinan mendapatkan barokah. Sebetulnya usaha usaha ekonomi di sekitar Madu tanpa pasang iklan di Rakom tidak ada pengaruhnya. Usaha mereka sudah jalan, namun karena ada keyakinan membantu pesantren sebagai amal soleh, maka mereka terlibat dalam partisipasi. Demikian juga pada fenomena mendirikan TV Swasta yang ternyata justru merugi, tetap difungsikan dalam rangka mengoptimalkan tujuan. Bukan mendatangkan keuntungan ekonomis.

## Daftar Bacaan

- Arifin, Anwar. 1984. *Komunikasi Sebuah pengantar*, Rajawali Press, Jakarta
- Bogdan, Robert.1982. *Participant Observation in Organizational Settings*, Syracuse University Press, New York
- Bourdieu. 1993. *The Field of Cultural Productions*, Polity Press, Cambridge
- Coleman, James S. 1990, *Foundations of Social Theory*, Belknap Press, Cambridge
- De Fluier, Martin & Sandra Ball-Rokeach. 1988. *Teori Komunikasi Massa*, edisi Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka
- Depari, Edward & Collin MacAndrews. 2006. *Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan*, Gadjah Mada University Press, cet ke-8, Yogyakarta,
- Fisher, B. Aubrey. 1990. *Teori Teori Komunikasi*, Penyunting Jalaluddin Rakhmat, PT Rosdha Karya, Bandung
- Fraser, Colin dan Restrepo Estrada, Sonia. 2001. *Buku Panduan Radio Komunitas*. Jakarta: UNESCO Jakarta Office
- Haryanto,Sindung/ 2012. *Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Postmodern*, Ar- Ruzz Media, Yogyakarta
- Harun, Rochajat & Elvinaro Ardianto. 2011. *Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosial*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, PT Raja Grafindo Persada, cet ke-3, Jakarta
- Jurriens, Edwin, "Radio Komunitas di Indonesia: 'New Brechtian Theatre' di Era eformasi?", *Jurnal Antropologi Indonesia XXVII*, No. 72 September, 2003
- Mansbridge, Jane J. 1990. *Beyond Self-Interest*, University of Chicago Press, Chicago
- Masduki. 2006. *Perkembangan dan Problematika Radio Komunitas di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, volume 1, nomor 1, Juni 2006 (ISSN : 1829-6564).
- 2007. *Regulasi Penyiaran Dari Otoriter ke Liberal*, LkiS, Yogya
- McQuali, Denis. 1987. *Mass Communication Theory*, Sage Publication, Beverly Hill
- 2011. *Mass Communication Theory*, terjemahan Putri Iva Izzati, Salemba Humanika, Jakarta
- Merton, Robert K. 1968. *Social Theory and Social Structure*, The Free Press, New York,
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi Revisi, cet ke-32, PT Rosdakarya Offset, Bandung
- Oetomo, Mochtar W, "Wajah Buruh di Media Massa- Sistem Konservasi, Hegemoni, dan Kekerasan Semiotik", *Jurnal GERBANG*, No.08, volume 03, tahun 2000
- "Imaji Demokrasi (di) Media", *jurnal GERBANG*, No.10, volume IV tahun 2001
- Panuju, Redi. 2017. *Sistem Penyiaran Indonesia Kajian Struktural Fungsional*, Kencana Prenada Media Group, edisi kedua, Jakarta.
- Piliang, Yasraf Amir. "Hegemoni Media Massa", *jurnal SENDI*, No.3 tahun 2000.
- Ritzer, Goerge. 1992. *Sociologi Ilmu Pengatahuan Berparadigma Ganda* (terjemahan Alimandan), Rajawali Press, Jakarta
- 2005. *Modern Sociological Theory*, Prenada Media, Jakarta
- Ritzer, Goerge & Barry Smart. 2012. *Handbook of Social Theory*, (Terjemahan Imam Muttaqien dkk), cetakan ke-2, Nusa Media, Bandung.
- Subiakto, Henri. 2010. *Kontestasi Wacana Tentang Sistem Penyiaran Yang Demokratis pasca Orde Baru : Analisis Konstruksi Sosial relasi Negara, Industri Penyiaran, dan Civil Society*, disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Sudibyo, Agus. 2004. *Ekonomi Politik Media Penyiaran*, LkiS, Yogyakarta
- 2009. *Kebebasan Semu – Penjajahan Baru di Jagad Media*,

Penerbit Buku KOMPAS, Jakarta

Sukundatmo, Bimo Nugroho. 2006. *Kontestasi Negara, Industri, dan Masyarakat Sipil dalam Kontroversi peraturan Pemerintah tentang Penyiaran*, tesis Pascasarjana UI, Jakarta.

Susanto, Astrid S. 1986. *Filsafat Komunikasi*, Bina Cipta, cet ke-3, Bandung

Wahyuni, Hermin Indah, *Politik Media dalam Transisi Politik : dari Kontrol Negara Menuju Self Regulation Mechanism*, Jurnal ilmu Komunikasi (ISSN 1829-6564) Volume 4, Nomor 1, tahun 2007

Wirawan, Ida Bagus. 2013. *Teori Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma, Kencana Prenada Media Group*, cet ke-2, Jakarta

### **Sumber Lain:**

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran

